

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Berbasis Kemitraan

Dalam tahap perencanaan, belum ada kajian ilmiah bersama yang mengakomodasi kepentingan akademik SMK dan DU/DI dalam menyusun rencana bersama yang berbentuk program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Kajian ilmiah tersebut di atas menganalisa kebutuhan-kebutuhan sekolah dan DU/DI, pembagian tugas kerja antara SMK dengan DU/DI dalam kemitraan. Rendahnya keterlibatan DU/DI dalam perencanaan serta penyusunan visi misi dan tujuan merupakan kelemahan pengakuan DU/DI terhadap sekolah. Sekolah tidak mampu melaksanakan visi tanpa adanya keterlibatan DU/DI pada semua level termasuk *input* (visi dan misi), sekolah belum sepenuhnya memahami perencanaan mutu sebagai suatu proses yang akan menentukan kualitas *output* dan mempengaruhi keterlibatan DU/DI.

2. Implementasi Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Berbasis Kemitraan

Kemitraan SMK dengan DU/DI belum ada strategi bersama dalam pelaksanaan visi dan misi, sebagai strategi untuk mencapai mutu masih menyimpan hambatan terutama dari aspek formal. Hanya beberapa kemitraan dengan DU/DI yang memiliki bukti otentik seperti MoU. Sekolah tidak memiliki tawar menawar yang tinggi pada saat DU/DI yang kurang berkomitmen pada upaya peningkatan mutu karena kemitraan hanya bersifat sukarela. Implementasi peningkatan mutu masih terbatas pada kemampuan SMK. Dalam implementasi mutu pihak DU/DI hanya terlibat praktek-praktek mutu berjangka pendek dan tidak *principle*.

3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Berbasis Kemitraan

Membahas kinerja proses kegiatan perencanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan mutu pendidikan dan perbaikan supaya mutu lulusan sesuai kebutuhan yang diharapkan DU/DI. Bentuk monitoring dan evaluasi sebatas pada pelaksanaan kerja industri tanpa penilaian proses. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan monitoring dan evaluasi terhadap unsur unsur tersebut kurang dilakukan. Pada level *input* tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, pada level proses monitoring dan evaluasi hanya dilakukan secara terbatas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang tampak dipermukaan dan lebih operasional. Permasalahan pada level proses terutama di sistem belum secara mendalam dikaji sehingga monitoring dan evaluasi untuk memprediksi *output* tidak dapat dilakukan secara ilmiah. Monitoring dan evaluasi terhadap kontribusi individu terhadap *output* belum dilakukan secara ilmiah. Kajian ilmiah melalui teknik survey kepuasan pelanggan dilakukan pada akhir tahun dengan sumber terbatas dan penilaian belum secara detail menunjukkan hasil kinerja lembaga. Hasil survey kepuasan pelanggan yang dilakukan pada akhir tahun bisa menimbulkan bias penilaian akibat bentuk survey yang terlalu umum. Setiap level diukur, dianalisis, dan disimpulkan melalui pendekatan ilmiah. Sekolah belum menerapkan kemitraan dengan DU/DI yang mampu membantu pada kajian peningkatan mutu pada semua level termasuk dalam level proses.

4. Tindak Lanjut Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Berbasis Kemitraan

Tindak lanjut dalam perbaikan belum ada komitmen bersama untuk menindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dalam peningkatan mutu pembelajaran seperti yang direncanakan bersama. Identifikasi masalah yang dilaksanakan secara ilmiah masih terbatas, tindak lanjut perbaikan bersifat kreatif buka proaktif guna meminimalisir masalah melalui tindakan prediktif.

Keterbatasan monitoring dan evaluasi terhadap unsur-unsur utama TQM menyebabkan tindakan hanya dilakukan pada tingkat operasional sedangkan pada

level sistem seperti pengaruh sistem kompensasi terhadap komitmen organisasi belum dilakukan. DU/DI belum ditempatkan sebagai mitra strategis sekolah.

B. Rekomendasi

Kemitraan bersama DU/DI akan mempermudah sekolah untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan pada setiap tahap pengelolaan mutu secara terus menerus. 1) Pada level perencanaan, sekolah sebaiknya bermitra dengan DU/DI terutama dalam mengidentifikasi sumber daya internal dan eksternal 2) Pada level Implementasi, sebaiknya kemitraan dikelola dengan kepemimpinan yang dapat memfasilitasi sekolah dengan DU/DI dan mendorong komitmen 3) pada tahap Monev, evaluasi sebaiknya dilakukan dengan DU/DI dengan fokus pada unsur-unsur utama TQM dan evaluasi *output* secara objektif 4) pada level tindakan perbaikan difokuskan pada setiap tahapan mutu tidak hanya ditujukan untuk *output*. Kepala sekolah sebagai manajer maupun tim kerja mutu menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam membangun sekolah bermutu. Kepala sekolah dan DU/DI mendorong setiap peran dan tanggung jawab anggota organisasi melalui sistem. Tim mutu yang dibentuk bersama antara SMK dan DU/DI mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan sistem manajemen mutu pada setiap tahapan.

. Kepala sekolah sebaiknya mendorong anggota organisasi berkomitmen terhadap kemitraan. Sistem penerapan manajemen mutu berbasis kemitraan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik sekolah maupun karakteristik DU/DI yang menjadi mitra dan diterapkan secara bertahap guna meminimalisir adanya penolakan dan memperbesar penerimaan integrasi sistem ke dalam organisasi sekolah oleh individu.

Berdasarkan makna pentingnya kemitraan bagi upaya pengembangan SDM maka konsep kemitraan pada tingkat nasional dapat digunakan sebagai landasan rasional yang digunakan untuk menyusun kebijakan, mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan SMK. Kebijakan dalam skala nasional tentang kemitraan seyogyanya menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pada tingkat provinsi dengan beberapa

penyesuaian tergantung pada masalah-masalah kemitraan dan karakteristik DU/DI. Pada tingkat Kota, konsep kemitraan dijadikan sebagai salah satu argumentasi logis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mutu serta keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan lebih mahal dibanding sekolah menengah atas dan beban anggaran terbesar adalah di tingkat kota/Kabupaten. Kemitraan sebaiknya dijadikan sebagai konsep untuk mengurangi keterbatasan dalam anggaran pendidikan vokasional terutama di tingkat II atau kabupaten.